

Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value for Money* Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI)

Diana Prasetia¹, Hendri Saladin², Nurmala³

¹⁾²⁾³⁾ Universitas PGRI Palembang

Jl. Jend. Ahmad Yani, Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Kota Palembang, Indonesia

¹⁾dianaprastia011@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:
Kinerja
Pemerintah daerah
Sektor publik
Value for money

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengukuran kinerja pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Kayuagung Ogan Komering Ilir (OKI) dengan menggunakan prinsip *value for money* tahun 2021-2022. Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan metode *value for money*. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang di dapat dari teknik dokumentasi dan wawancara. Populasinya adalah laporan realisasi anggaran dengan 2 sampel data yaitu data anggaran realisasi pendapatan dan data anggaran realisasi belanja periode 2021-2022. Teknik analisa datanya adalah deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis kinerja pemerintah daerah dengan metode *value for money*. Dari hasil analisis data, bahwa dengan menggunakan metode *value for money*, prestase rasio ekonomi tahun 2021-2022 mengalami kenaikan dari 48,57% menjadi 86,96%. Sedangkan untuk presentase rasio efisiensi mengalami fluktuasi yaitu berada diangka 90-100%. Akan tetapi meskipun berada diangka presentase yang besar, namun arti dari presentase tersebut adalah kurang efisien. Berbeda dengan presentase rasio efektivitas yang memiliki perbandingan kurang lebih sebesar 30% antar tahunnya yang mana pada tahun 2021 dikatakan tidak efektif karena berada dibawah angka 60% dan pada tahun 2022 dikatakan cukup efektif karena berada diangka 80-90%. Dengan meningkatnya jumlah presentase dari tahun 2021 ke tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten OKI kurang dalam menjaga penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik di Indonesia telah tumbuh secara signifikan karena penerapan undang-undang otonomi daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah memiliki keistimewaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat. Dengan kata lain, daerah dan kabupaten di Indonesia dibiarkan tumbuh dan berkembang sumber pendapatannya untuk kepentingan masyarakat setempat dan kemajuan daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasional daerah. Salah satunya adalah aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati mengenai masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengukuran kinerja sendiri sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas digunakan bukan hanya sekedar untuk menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut iddibelanjakan seara ekonomis, efektif, dan efisien.

Kinerja keuangan adalah area penting untuk penelitian di perusahaan sektor publik. Setiap perusahaan sektor publik khususnya pemerintah dituntut untuk dapat mencapai kinerja keuangan pemerintah yang baik sejak munculnya penganggaran berbasis kinerja. Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik yang lebih besar kepada organisasi publik, diharapkan setiap entitas sektor publik di pusat dan daerah mampu mengurangi kecurangan dan perilaku negatif lainnya seperti pemborosan dan kebocoran uang.

Menurut Kurnia (2016) Agar pengelolaan APBD dapat mandiri, efektif, dan efisien, maka harus ada standar yang menjadi acuan. Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan daerah sangat penting untuk dijadikan tolak ukur dalam penyusunan kebijakan tahunan anggaran yang akan datang.

Kemampuan untuk mengembangkan sistem manajemen yang dapat mendukung operasional daerah merupakan persyaratan bagi pemerintah daerah. Salah satu bidang pemerintahan daerah yang membutuhkan pengaturan yang efektif adalah masalah pengelolaan APBD dan keuangan daerah. Dalam rangka mengevaluasi akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, evaluasi kinerja menjadi sangat penting.

Kinerja keuangan menurut Wiratna (2017:71) adalah suatu hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan dan kemudia hasil tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukannya penilaian atau pengukuran secara periodik. Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik yang lebih besar kepada organisasi publik, diharapkan setiap entitas sektor publik di pusat dan daerah mampu mengurangi kecurangan dan perilaku negatif lainnya seperti pemborosan dan kebocoran uang. Pemerintah bertugas meningkatkan kesejahteraan warganya dan menjaga keinginan mereka untuk membangun administrasi yang baik.

Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik yang lebih besar kepada organisasi publik, diharapkan setiap entitas sektor publik di pusat dan daerah mampu mengurangi kecurangan dan perilaku negatif lainnya seperti pemborosan dan kebocoran uang. Pemerintah bertugas meningkatkan kesejahteraan warganya dan menjaga keinginan mereka untuk membangun administrasi yang baik.

Organisasi pemerintah menggunakan penilaian kinerja sebagai alat manajemen untuk meningkatkan standar akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Berusaha untuk menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan operasi sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka memenuhi visi dan misi suatu instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah metode untuk menilai tindakan yang diambil sesuai dengan standar yang dibuat untuk organisasi pemerintah. *value for money* yang sering disebut sebagai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui penganggaran berbasis kinerja

Laporan yang digunakan untuk pengukuran kinerja adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan realisasi anggaran yang dipublikasi oleh pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan daerah. Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan arus kas (Sihombing, 2018).

Menurut Mahmudi (2019:14), pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Sedangkan menurut Ismail (2020:1), pengukuran kinerja adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu setiap karyawannya. Proses pengukuran kinerja harus mampu mengidentifikasi standar dan mampu mengukur kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja karyawan. Standar kinerja adalah patokan yang digunakan dalam menilai kinerja aktual karyawan. Agar penilaian tersebut efektif, maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasil yang diinginkan oleh setiap pekerjaan.

Tujuan pengukuran kinerja yaitu untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik (top-down dan bottom-up), mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan secara seimbang, melacak kemajuan dalam mencapai strategi, dan untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan middle and lower managers serta memotivasi untuk mencapai keselarasan tujuan serta sebagai alat pendekatan individu untuk mencapai kepuasan dan kemampuan kolektif berdasarkan pertimbangan yang logis.

Ekonomi adalah perbandingan sumber daya dan nilai investasi yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terpaut sejauh mana lembaga pemerintah mengurangi sumber daya produksi dan juga menghindari yang tidak perlu. Sebuah kegiatan dikatakan ekonomis apabila dapat menghindari atau membatasi pengeluaran yang kurang penting. Efisiensi adalah yaitu suatu cara untuk memperoleh output tertinggi dan juga menggunakan input seminimal mungkin untuk mencapai hasil tertinggi. Sebuah kegiatan dapat dikatakan efisien apabila tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Efektivitas adalah tingkatan dari pencapaian atas hasil program dengan tujuan yang telah ditentukan. Sebuah kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

value for money adalah alat yang hebat untuk mengevaluasi kinerja keuangan organisasi sektor publik karena secara signifikan meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah untuk memberikan kesadaran biaya publik.

Sebagai landasan untuk mewujudkan akuntabilitas publik, *value for money* dapat meningkatkan pelayanan masyarakat secara tepat waktu dan sejalan. Dengan *value for money* dapat meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat dan sesuai dengan tujuan untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas tinggi dengan menggunakan sumber daya secara hemat, efisien, dan efektif sebagai landasan untuk mencapai akuntabilitas publik. Tujuan untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang baik dengan memanfaatkan sumber daya secara hemat, efisien, dan efektif.

1. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomi adalah cara untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik, yang mana pengukuran tersebut memerlukan data dari anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar presentase ekonomisnya, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Adapun rumus ekonomis menurut Mahmudi (2019) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi biaya belanja daerah}}{\text{Anggaran biaya belanja daerah}} \times 100\%$$

Presentase	Kriteria
100% keatas	Sangat ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup ekonomis
60%-80%	Kurang ekonomis
<60%	Tidak ekonomis

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan pendapatan dan belanja daerah yang berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan relaisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Adapun rumus efisiensi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja daerah}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

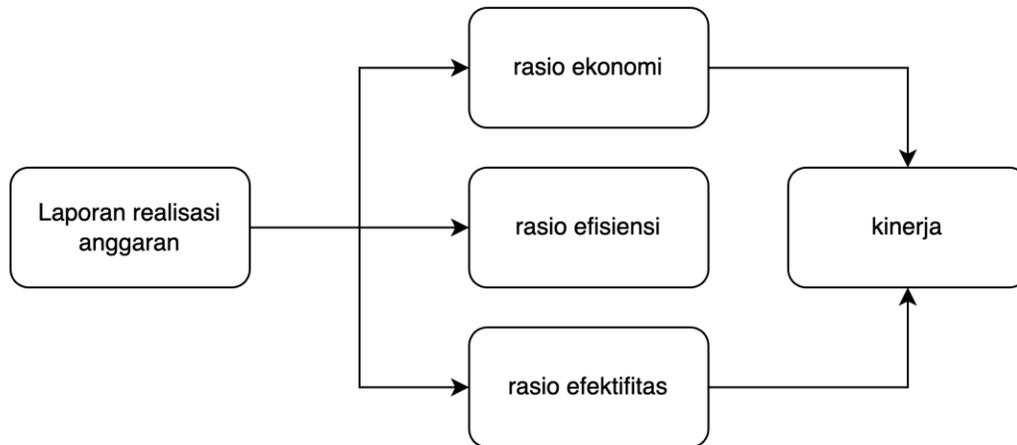
Presentase	Kriteria
100% keatas	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat efisien

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang memperhitungkan keberadaan belanja daerah yang harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapaiannya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari pendapatan daerah tersebut. Adapun rumus untuk menghitung rasio efektivitas menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Anggaran pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Presentase	Kriteria
100% keatas	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

Organisasi di sektor publik sering dipandang tidak efisien, boros, lokasi di mana uang sering hilang, dan institusi yang membocorkan uang. Untuk membangun akuntabilitas publik, sangat penting bahwa entitas sektor publik memantau kinerja. Analisis *value for money* adalah metode untuk menilai efisiensi pemerintah daerah. Ketika sumber daya ditransfer untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, hubungan antara sumber daya, biaya, dan manfaat disebut dengan *value for money*. Di Kantor Kecamatan Kayuagung ini peneliti akan mengukur rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas.

II. METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode kuantitatif, penelitian di lakukan di Kantor Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang menjadi lokasi penelitian

Menurut Sugiyono (2021:296), teknik pengumpulan data adalah ketika orang melakukan penelitian, mereka perlu mengumpulkan informasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang sesuatu. Cara mereka mengumpulkan informasi ini pun sangat penting. Jika tidak menggunakan teknik yang tepat, mungkin saja tidak akan mendapatkan informasi yang tepat seperti yang dibutuhkan. Ada beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi adalah data yang dikumpulkan dengan observasi lapangan langsung terhadap data yang sudah ada di dalam organisasi pada saat penelitian dilakukan.
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Dokumentasi adalah ketika orang menulis atau menggambar hal-hal yang terjadi di masa lalu sehingga kita dapat mengingatnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Kantor Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI.

Menurut Sugiyono (2021:130), populasi adalah kategori besar objek atau orang yang telah dipilih peneliti untuk diselidiki dan ditarik kesimpulan berdasarkan jumlah dan karakteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah laporan analisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). sampel populasi yang diambil harus mewakili secara akurat. Laporan analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dijadikan sebagai sampel penelitian.

Menurut Sugiyono (2021:57), variabel penelitian adalah kualitas, jenis, atau nilai dari suatu subjek, benda, kelompok, atau kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti untuk diselidiki dan dari mana kesimpulan akan dibuat.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
<i>Value for money</i>	<i>value for money</i> adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi publik berdasarkan dengan tingkat keberhasilan suatu program kerja yang mengacu kepada tiga elemen utama. (Riadi, 2020)	a. Ekonomi b. Efisiensi c. Efektivitas
Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja adalah evaluasi hasil kerja dari seorang karyawan secara sistematis yang berhubungan dengan jabatan dan potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan. (Ismail, 2020:2).	a. Kualitas pekerjaan b. Ketepatan waktu c. Potensi karyawan

Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2021:226). Proses ini melibatkan pengumpulan data dari responden, pengelompokannya berdasarkan variabel dan kategori, pembuatan tabulasi data, serta analisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan. Metode ini terutama fokus pada pengklasifikasian, analisis, dan interpretasi data untuk memberikan gambaran mendalam tentang masalah yang diselidiki. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga melibatkan analisis varian pendapatan, yang dievaluasi melalui perbandingan antara target dan realisasi pendapatan, seperti yang dijelaskan oleh Gitta & Rida (2020). Formula yang digunakan adalah Realisasi Tahun t minus Anggaran Tahun t , dan persentase varian pendapatan dihitung dengan membagi realisasi dengan anggaran, dikalikan 100%. Selanjutnya, analisis pertumbuhan pendapatan dilakukan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tahunan, menggunakan formula pertumbuhan pendapatan yang ditunjukkan oleh Sandy dkk (2018), di mana pertumbuhan dihitung dengan mengambil pendapatan tahun ini dikurangi pendapatan tahun sebelumnya, dibagi dengan pendapatan tahun sebelumnya, dikalikan 100%.

III. HASIL

Kecamatan Kayu Agung merupakan salah satu Kecamatan Definitif dan merupakan ibukota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara geografis, Kecamatan ini terletak diantara 104,20°-106,00° Bujur Timur dan 40,30°-40,15° Lintang Selatan. Kecamatan ini terletak pada ketinggian ± 10 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah 224,60 km².

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui besarnya presentase digunakan 3 rasio perhitungan yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Adapun tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2021-2022 Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2022

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2021	Pendapatan	2.298.942.882.263	1.339.654.951.179	959.287.931.083
	Belanja	2.705.500.006.408	1.314.113.145.325	1.331.386.861.083
	Pembiayaan	416.557.124.145	0.00	0.00
2022	Pendapatan	2.695.033.090.451	2.399.947.846.897	295.085.243.553
	Belanja	2.718.576.155.139	2.364.129.460.296	354.386.694.748
	Pembiayaan	67.065.279.369	56.943.463.977	10.121.815.398

Sumber: Kabupaten OKI

Dari data diatas dapat diketahui bahwa biaya anggaran pada pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp.2.298.942.882.263 dan realisasinya sebesar Rp.1.339.654.951.179, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan biaya anggaran yaitu senilai Rp.2.695.033.090.451 dan realisasinya senilai Rp.2.399.947.846.897. Anggaran dana Belanja daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.2.705.500.006.408 dengan realisasi sebesar Rp.1.314.113.145.325, sedangkan pada tahun 2022 dana anggaran belanja daerah mengalami peningkatan senilai Rp. 2.718.576.155.139 dan realisasi belanja daerah senilai Rp.2.364.129.460.296. Dan anggaran pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp.416.557.124.145 dan realisasi sebesar Rp.0.00, sedangkan pada tahun 2022 senilai

mengalami penurunan sebesar Rp.67.065.279.369 serta realisasinya senilai Rp.56.943.463.977. Dari nilai LRA pada tabel 1 untuk mengetahui besarnya presentase, maka dapat dihitung dengan menggunakan 3 rasio sebagai berikut:

a. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi merupakan suatu cara untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik, yang mana pengukuran tersebut memerlukan data dari anggaran pengeluaran dan realisasinya

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Ekonomi 2021} = \frac{1.314.113.145.325}{15.900.305.406} \times 100\% = 48,5$$

Dari perhitungan dengan menggunakan rasio ekonomi didapatkan hasil presentase sebesar 48,5%

$$\text{Rasio Ekonomi 2022} = \frac{2.364.169.460.296}{2.718.516.155.139} \times 100\% = 86,9\%$$

Jadi, presentase yang didapatkan dengan menggunakan perhitungan rasio ekonomi pada tahun 2022 adalah sebesar 86,9%.

Tabel 3 Anggaran Realisasi Belanja.

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentase	Keterangan
2021	2.705.500.006.408	1.314.113.145.325	48,57%	Tidak ekonomis
2022	2.718.516.155.139	2.364.129.460.296	86,96%	Cukup ekonomis

Dari data pada tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa hasil presentase anggaran realisasi belanja daerah dengan menggunakan perhitungan rasio ekonomi yaitu sebesar 48,57% pada tahun 2021 dan 86,96% pada tahun 2022. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten OKI tidak ekonomis dalam merealisasikan anggaran belanja daerah sehingganya terdapat selisih yang besar antara anggaran dan realisasinya. Sedangkan pada tahun 2022, dengan besaran presentase sebesar 86,96% dapat diartikan bahwa pemerintah Kabupaten OKI cukup ekonomis dalam merealisasikan anggaran belanja daerah.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan suatu pendapatan dan belanja daerah yang berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2021} = \frac{1.314.113.145.325}{1.339.654.951.179} \times 100\% = 98,09\%$$

Jadi, besarnya presentase yang didapatkan dari perhitungan rasio efisiensi yaitu sebesar 98,09%.

$$\text{Resio Efisiensi 2022} = \frac{2.364.169.460.296}{2.399.947.846.897} \times 100\% = 98,5\%$$

Dari hasil perhitungan di atas didapatkan hasil presentase dengan menggunakan rasio efisiensi yaitu sebesar 98,50%.

Tabel 4 Realisasi Belanja dan Pendapatan

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Presentase	Keterangan
2021	1.314.113.145.325	1.399.654.951.179	98,09%	Kurang efisien
2022	2.364.129.460.296	2.399.947.846.897	98,50%	Kurang efisien

Dari data pada tabel 4 di atas, dapat di ketahui bahwa besarnya presentase pendapatan belanja dengan menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2021 yaitu sebesar 98,09% dan 98,50% pada tahun 2022. Dapat diartikan bahwa pada tahun 2021-2022, pemerintah Kabupaten OKI kurang efisien dalam merealisasikan dana belanja dan pendapatan sehingganya didapatkan hasil presentase di bawah 100%.

c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan suatu rasio yang memperhitungkan keberadaan belanja daerah yang harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapaiannya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari pendapatan daerah tersebut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2021} = \frac{1.339.654.951.179}{2.298.942.882.263} \times 100\% = 58,2\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dengan menggunakan rasio efektivitas, didapatkan presentase pada tahun 2021 sebesar 58,27%.

$$\text{Rasio Efektivitas 2022} = \frac{2.399.947.846.897}{2.695.033.090.451} \times 100 = 89,0\%$$

Jadi, besarnya presentase dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas yaitu sebesar 89,05%.

Tabel 5 Anggaran Realisasi Pendapatan

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Presentase	Keterangan
2021	2.298.942.882.263	1.339.654.951.179	58,27%	Tidak efektif
2022	2.695.033.090.451	2.399.947.846.897	89,05%	Cukup efektif

Dari data pada tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa hasil presentase anggaran realisasi pendapatan dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas yaitu sebesar 58,27% pada tahun 2021 dan 89,05% pada tahun 2022. Pada tahun 2021 besarnya presentase <60% yang artinya bahwa pemerintah Kabupaten OKI tidak efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan daerah. Begitupun sebaliknya, pada tahun 2022 didapatkan hasil presentase sebesar 89,05% yang artinya pemerintah Kabupaten OKI cukup efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan daerah.

Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pekerjaan

Kualitas Pekerjaan dalam Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir: Analisis Mendalam Pengelolaan anggaran di suatu daerah merupakan aspek yang krusial dalam menentukan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Kualitas pekerjaan dalam pengelolaan anggaran mencerminkan kemampuan dan kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan menggunakan dana publik secara efisien dan efektif.

Analisis mendalam terhadap realisasi anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk tahun 2021 dan 2022 memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Kinerja Pengelolaan Anggaran Tahun 2021:

Tahun 2021 menandai periode di mana Kabupaten Ogan Komering Ilir menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran daerah. Data menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada tahun tersebut hanya mencapai 48,57% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan efektivitas pendapatan, yang hanya mencapai 58,27% dari anggaran pendapatan yang direncanakan. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa ketidakseimbangan ini terutama disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang, pengelolaan yang tidak efisien, dan kurangnya pengawasan yang memadai terhadap penggunaan anggaran.

Penyebab Kualitas Pekerjaan yang Kurang Memuaskan:

- a. Pertama, kurangnya perencanaan yang matang menjadi faktor utama yang menghambat kualitas pekerjaan dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan yang tidak memadai dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam alokasi dana, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang efektif. Selain itu, kurangnya koordinasi antara unit-unit dalam pemerintah daerah juga dapat menghambat proses perencanaan yang efisien.
- b. Kedua, pengelolaan yang tidak efisien turut berkontribusi pada rendahnya kualitas pekerjaan dalam pengelolaan anggaran. Kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan dana publik. Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran.

Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Pekerjaan:

Meskipun menghadapi tantangan pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pekerjaan dalam pengelolaan anggaran. Langkah-langkah yang diambil termasuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian intern, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Kinerja Pengelolaan Anggaran Tahun 2022:

Tahun 2022 menjadi momentum perbaikan bagi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam realisasi anggaran, di mana anggaran belanja daerah mencapai 86,96% dari total anggaran yang direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pekerjaan, di mana pemerintah daerah mampu mengalokasikan dan menggunakan dana publik dengan lebih efisien dan efektif.

Faktor-Faktor Pendukung Peningkatan Kualitas Pekerjaan:

Peningkatan kualitas pekerjaan dalam pengelolaan anggaran pada tahun 2022 dapat diatribusikan pada beberapa faktor. Pertama, peningkatan perencanaan yang matang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat sasaran. Kedua, pengelolaan yang lebih efisien dan transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko penyelewengan anggaran.

2. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran merupakan indikator krusial yang menggambarkan efisiensi operasional pemerintah. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tantangan dalam mengelola anggaran secara tepat waktu diperlihatkan melalui analisis data realisasi anggaran tahun 2021 dan 2022. Analisis ini memberikan wawasan mendalam mengenai kemajuan yang dibuat dari tahun ke tahun dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

Tahun 2021: Ketidaktepatan dalam Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, realisasi anggaran pendapatan dan belanja di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan ketidaktepatan yang signifikan. Dari anggaran pendapatan sebesar Rp 2.298.942.882.263, hanya Rp 1.339.654.951.179 yang terealisasi, dan dari anggaran belanja sebesar Rp 2.705.500.006.408, hanya Rp 1.314.113.145.325 yang terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat selisih yang besar antara anggaran yang direncanakan dengan yang terealisasi. Penyebab utama dari ketidaktepatan ini

meliputi perencanaan awal yang kurang akurat, koordinasi antar departemen yang tidak efektif, dan kemungkinan keterlambatan dalam pengalokasian dan pencairan dana.

Ketidaktepatan waktu ini mengakibatkan sejumlah konsekuensi, termasuk penundaan dalam pelaksanaan proyek dan program yang berpotensi menghambat pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, hal ini juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam mengelola dana dengan efektif.

Upaya Peningkatan Ketepatan Waktu di Tahun 2022

Memasuki tahun 2022, Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam ketepatan waktu pengelolaan anggaran. Anggaran pendapatan yang terealisasi meningkat menjadi Rp 2.399.947.846.897 dari target Rp 2.695.033.090.451, dan realisasi anggaran belanja meningkat menjadi Rp 2.364.129.460.296 dari target Rp 2.718.576.155.139. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan akurasi perencanaan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Langkah-langkah yang telah diimplementasikan untuk mencapai peningkatan ini meliputi:

- a. Perbaikan Sistem Perencanaan: Penggunaan data yang lebih akurat dan terkini untuk perencanaan anggaran, memastikan bahwa estimasi anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan nyata.
- b. Penguatan Koordinasi Antar Departemen: Mengadakan rapat rutin dan peningkatan komunikasi antar departemen untuk memastikan semua unit pemerintah bergerak sesuai dengan rencana yang telah disusun, mengurangi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran.
- c. Optimalisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi: Implementasi sistem monitoring yang lebih ketat dan evaluasi periodik untuk mengevaluasi progress dari setiap kegiatan anggaran, memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan yang terjadi dan melakukan koreksi yang diperlukan.
- d. Peningkatan Kemampuan SDM: Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf yang terlibat dalam proses perencanaan dan eksekusi anggaran, meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan publik.
- e. Digitalisasi Proses Pengelolaan Anggaran: Mengadopsi teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan data anggaran, mempercepat proses pencairan dana, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Dampak Peningkatan Ketepatan Waktu

Dengan perbaikan dalam ketepatan waktu pengelolaan anggaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami sejumlah perubahan positif. Pertama, peningkatan ketepatan waktu membantu mempercepat pelaksanaan proyek dan program pemerintah yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini juga berkontribusi pada peningkatan kinerja ekonomi lokal karena dana yang dialokasikan dapat segera dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi.

Kedua, ketepatan waktu yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah daerah dapat mengelola anggaran dengan tepat dan efektif, hal ini memperkuat legitimasi dan dukungan publik terhadap kebijakan dan program pemerintah.

Ketiga, peningkatan dalam ketepatan waktu juga mengurangi risiko korupsi dan penyelewengan anggaran. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik serta transparansi yang ditingkatkan melalui digitalisasi, praktik-praktik penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.

Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun terdapat peningkatan yang signifikan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, perubahan dalam regulasi atau kebijakan yang tidak terduga bisa mempengaruhi ketepatan waktu pengelolaan anggaran. Untuk mengatasi ini, pemerintah daerah harus lebih fleksibel dan responsif dalam mengadaptasi rencana anggaran dengan kondisi yang berubah.

Selain itu, penguatan sistem IT untuk pengelolaan anggaran masih perlu terus ditingkatkan. Investasi dalam teknologi informasi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Potensi Karyawan

Ketika menganalisis potensi karyawan dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada bagaimana staf yang terlibat dalam proses pengelolaan dan realisasi anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir memanfaatkan kapasitas mereka untuk mencapai hasil yang maksimal dan meningkatkan performa di tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2021: Evaluasi Kapasitas Karyawan

Pada tahun 2021, terdapat beberapa masalah dalam realisasi anggaran yang menunjukkan kekurangan dalam kapasitas atau kemampuan karyawan yang terlibat. Ketidakmampuan untuk memenuhi target anggaran pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan mungkin mencerminkan kurangnya pelatihan yang memadai, pengalaman, atau sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut secara efisien. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah daerah telah menginvestasikan dalam pengembangan karyawan, baik dari segi pelatihan keuangan dan administrasi maupun dalam aspek penggunaan teknologi yang relevan.

Pelatihan dan Pengembangan

Pentingnya pelatihan dan pengembangan tidak bisa diabaikan dalam upaya meningkatkan kapasitas karyawan. Program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi anggaran dengan efektif. Hal ini termasuk pelatihan dalam perencanaan anggaran, analisis keuangan, manajemen risiko, dan penggunaan perangkat lunak manajemen keuangan. Selain itu, pemberian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dapat membantu dalam membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab individu terhadap pekerjaannya.

Pemanfaatan Teknologi

Kekurangan dalam penggunaan teknologi juga merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas karyawan. Adopsi sistem teknologi informasi yang canggih bisa memperbaiki efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran. Implementasi sistem ERP (Enterprise Resource Planning) atau software pengelolaan keuangan lainnya dapat meminimalisir kesalahan manusia dan mempercepat proses pelaporan dan dokumentasi. Ini tidak hanya memudahkan pekerjaan karyawan tetapi juga memungkinkan pengawasan dan analisis yang lebih baik atas data finansial.

Kultur Organisasi dan Kepemimpinan

Kultur organisasi yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan sangat vital dalam mengembangkan potensi karyawan. Kultur yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi terbuka antara karyawan dan manajemen dapat membantu mengidentifikasi masalah, berbagi pengetahuan, dan menemukan solusi secara kolektif. Kepemimpinan yang kuat dan visioner juga sangat dibutuhkan untuk mendorong dan memotivasi karyawan, menyediakan arahan yang jelas, dan menetapkan standar yang tinggi untuk kinerja dan profesionalisme.

Tantangan dan Rekomendasi

Beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi dari analisis ini termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan dalam sumber daya pelatihan, dan kebutuhan untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem evaluasi kinerja. Untuk mengatasi ini, disarankan agar pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir:

- a. Meningkatkan investasi dalam program pelatihan dan pengembangan karyawan secara teratur.
- b. Melakukan evaluasi kinerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan area untuk perbaikan.
- c. Menerapkan teknologi terbaru dan melakukan upgrade sistem yang sudah ada untuk memastikan efisiensi operasional.
- d. Mengembangkan kultur organisasi yang mendukung inovasi dan pertumbuhan profesional.

IV. KESIMPULAN

Analisis mengenai kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan potensi karyawan dalam pengelolaan anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa, seperti yang diukur melalui metode value for money menggunakan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk tahun 2021-2022. Peningkatan ini dikaitkan dengan keberhasilan dalam mencapai target Pendapatan Daerah dan pengurangan Belanja Daerah, yang menandakan pengelolaan yang lebih ekonomis dan efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan ini juga

didukung oleh peningkatan kapasitas karyawan melalui investasi dalam pelatihan dan teknologi, serta penerapan sistem pengawasan dan perencanaan yang lebih ketat, yang secara keseluruhan telah berkontribusi pada peningkatan kinerja pengelolaan anggaran, memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia; Teori, Konsep, Dan Indikator*. Riau: ZANAFAPUBLISHING.
- Fadhila, N., & Julianda, S. T. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 126-134.
- Faradiba. (2020). *Metode Pengukuran Fisika*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Ismail. (2020). *Pengukuran Kinerja SDM*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Kasmir. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jawa Barat: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Kurnia, S. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Maryanti, C. S., & Agus, M. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 2886-2899.
- Polli, I. R. A., David, P. E. S., & Steven, J. T. (2020) Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 781-788.
- Riadi, M. (2020). *Pengertian Dan Fungsi Perbankan*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins. (2016). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Jakarta: Gaya Medika.
- Rumagit, I. B. P., Herman, K., & Dhullo, A. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13-22.
- Sihombing, H. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah)*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&B*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan; Teori Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suprayoga, M. I., Hendry, S., & Jusmani. (2020). Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat. *Jurnal Mediasi*, 186-197.
- Tim. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: FEB Universitas PGRI Palembang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Zain, W. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, 1-17.
- Tim. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: FEB Universitas PGRI Palembang.